



Kajian Konseptual Kepemimpinan Struktural Gereja Lokal dalam Mendorong Dialog Antaragama untuk Mereduksi Konflik Sosial

Lisdiaken Jenister¹, Andrika Telaumbanua², Erni Dethan³
Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan^{1,2,3}
lisdiakenj@gmail.com¹

Abstrak: Konflik sosial yang dilatarbelakangi perbedaan agama masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemimpin gereja menjadi penting, khususnya dalam membangun dialog antar agama yang konstruktif dan berkelanjutan. Namun, perbedaan struktur dan organisasi gereja seringkali mempengaruhi cara pemimpin gereja menjalankan peran tersebut, sehingga diperlukan kajian yang lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kepemimpinan struktural gereja lokal dalam mendorong dialog antaragama untuk mereduksi konflik sosial, dengan memperhatikan konteks organisasi gereja dan dinamika sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin gereja memiliki peran strategis sebagai mediator, fasilitator, dan agen perdamaian dalam dialog antaragama. Dialog yang dibangun secara inklusif, terbuka, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan terbukti mampu mereduksi potensi konflik sosial serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.

Kata Kunci: Dialog Antaragama; Konflik Sosial; Pemimpin Gereja

Abstract: *Social conflicts based on religious differences remain a serious challenge in Indonesia's pluralistic society. In this context, the role of church leaders is important, particularly in building constructive and sustainable interfaith dialogue. However, differences in church structures and organizations often influence how church leaders carry out this role, requiring more specific and contextual studies. This study aims to analyze the contribution of local church structural leadership in promoting interfaith dialogue to reduce social conflict, taking into account the context of church organization and social dynamics. The research method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical design, through literature study and analysis of relevant documents. The results of the study show that church leaders have a strategic role as mediators, facilitators, and agents of peace in interfaith dialogue. Dialogue that is built in an inclusive, open, and human values-oriented manner has proven to be able to reduce the potential for social conflict and strengthen social cohesion amid diversity.*

Keywords: Church Leaders; Interfaith Dialogue; Social Conflicts

PENDAHULUAN

Konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat multikultural Indonesia menjadi tantangan yang signifikan bagi pemimpin agama, khususnya pemimpin gereja. Konflik sosial merupakan sebuah bentuk pertentangan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan keyakinan. Simarmata juga menegaskan bahwa salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi adalah, ketegangan antar umat beragama, itu termasuk konflik yang dimana adanya keterlibatan gereja (Simarmata et al., 2024). Dalam bentuknya yang paling sederhana, konflik sosial dapat berupa ketegangan antar individu atau kelompok, namun dalam skala yang lebih luas dapat berkembang menjadi kekerasan, diskriminasi, dan bahkan disintegrasi sosial. Dalam konteks ini, peran pemimpin gereja sangat penting dalam membangun dialog antar agama untuk meredakan ketegangan dan menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Fenomena konflik sosial berlatar belakang agama di Indonesia masih terus terjadi dan dapat ditelusuri secara empiris melalui berbagai laporan resmi dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang diterbitkan oleh SETARA Institute pada tahun 2020–2023 secara konsisten mencatat ratusan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama setiap tahun, dengan bentuk dominan berupa penolakan pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konflik tidak diawali oleh kekerasan terbuka, melainkan oleh minimnya interaksi dan absennya dialog antarumat beragama di tingkat komunitas. Sejalan dengan itu, laporan Wahid Foundation pada tahun 2022 dan 2023 menegaskan bahwa wilayah yang tidak memiliki ruang dialog lintas iman yang aktif cenderung lebih rentan terhadap berkembangnya prasangka dan isu intoleransi. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa rendahnya intensitas komunikasi antar agama berimplikasi pada lemahnya kohesi sosial dan meningkatnya potensi konflik horizontal. Data konflik sosial yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam publikasi 2021–2023 juga memperlihatkan bahwa konflik berbasis identitas kerap bermula dari gesekan kecil yang tidak dikelola melalui dialog dan musyawarah, sehingga berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan menimbulkan dampak psikososial jangka panjang bagi masyarakat. Temuan-temuan empiris tersebut menegaskan bahwa ketiadaan dialog antar agama merupakan faktor nyata dan struktural yang berkontribusi terhadap eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

Dialog antaragama merupakan sebuah komunikasi terbuka yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda dengan tujuan yang saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah, bahwa pemimpin agama yang memiliki wawasan pluralisme dapat berkontribusi besar dalam merawat toleransi beragama, yang merupakan pondasi penting untuk mencegah konflik sosial (Azizah et al., 2020). Idealnya, dialog ini menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua pihak untuk berbagi pandangan tanpa adanya rasa curiga atau prasangka antara satu sama lain. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri, bahwa dialog antar agama dapat menjadi pondasi bagi pembangunan sosial yang damai dan inklusif (Putri & Putri, 2022). Oleh karena itu, membangun dialog antar agama dapat menjadi langkah utama atau penting dalam mengatasi konflik dan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya dialog antaragama dalam mereduksi konflik sosial. Purba menegaskan bahwa penyelesaian konflik sosial memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemerintah, dan lembaga sosial lainnya (Purba, 2024). Selain itu, Amtiran dan Kriswibowo menyatakan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis sebagai fasilitator dialog lintas iman dalam masyarakat multikultural (Amtiran & Kriswibowo, 2024). Penelitian lain juga menekankan pentingnya pendidikan moderasi beragama serta sistem deteksi dini konflik dalam mencegah eskalasi konflik sosial (Asrianti & Khalik, 2020). Dari penelitian yang sudah ada, ditemukan bahwa berbagai solusi telah diberikan, baik melalui solusi jangka pendek dan jangka panjang, pemimpin gereja lokal sebagai fasilitator, dorongan pemerintah daerah, pendidikan multikultural dan pendidikan agama, pentingnya pemahaman sejak dini, serta sistem deteksi dini konflik

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemimpin agama memiliki peran penting dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks gereja, kepemimpinan gerejawi dapat berkontribusi dalam membangun dialog antaragama sebagai upaya untuk mereduksi konflik sosial. Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada peran pemimpin gereja dalam membangun dialog antaragama untuk mengatasi konflik sosial, dengan menekankan pentingnya nilai kesatuan di dalam Kristus sebagai dasar etis dan teologis dalam membangun relasi lintas iman, bukan menonjolkan perbedaan doktrinal yang berpotensi memicu ketegangan antar kelompok (Malau, 2024). Pendekatan ini dipandang efektif dalam menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan konstruktif di tengah masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, pemimpin gereja juga memiliki peran strategis dalam membuka ruang komunikasi lintas agama melalui berbagai bentuk kegiatan sosial dan keagamaan. Menurut Simanjuntak, pemimpin gereja dapat mendorong terbangunnya dialog antaragama melalui kegiatan seperti ibadah bersama, pelayanan sosial, serta diskusi teologis yang dilakukan secara terbuka dan dengan sikap kerendahan hati (Simanjuntak et al., 2020). Praktik-praktik tersebut tidak hanya memperkuat relasi antar komunitas keagamaan, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat.

Selain itu, kepemimpinan gereja juga memiliki peran edukatif dalam membentuk sikap jemaat terhadap kelompok agama lain. Keteladanan pemimpin gereja dalam membangun komunikasi yang positif dan inklusif dapat membantu menghindari munculnya ujaran negatif maupun sikap eksklusif terhadap kelompok keagamaan lainnya. Dalam hal ini, pengajaran yang menekankan nilai-nilai kasih, pengampunan, serta sikap saling menghormati menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan bersama yang damai di tengah masyarakat yang plural (Shofiyyah et al., 2023). Dengan demikian, kepemimpinan gereja tidak hanya berfungsi sebagai otoritas spiritual bagi jemaat, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam membangun dialog antaragama dan mereduksi potensi konflik sosial di masyarakat. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemimpin gereja dalam membangun dialog antar agama dalam mengatasi konflik sosial? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemimpin gereja sebagai solusi dalam membangun dialog antar agama sehingga dapat mengatasi konflik sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji secara konseptual peran pemimpin gereja dalam membangun dialog antaragama sebagai upaya mereduksi konflik sosial. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kepemimpinan gereja, dialog antaragama, serta resolusi konflik sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai konsep serta temuan penelitian yang berkaitan dengan peran kepemimpinan gereja dalam mendorong dialog antaragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemimpin Gereja dalam Dialog Antar Agama

Pemimpin gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dialog antar agama, terutama dalam konteks konflik sosial. Dalam banyak kasus, pemimpin gereja menjadi jembatan antara berbagai komunitas yang berbeda keyakinan. Menurut data dari Pew Research Center (2020), sekitar 84% populasi dunia mengidentifikasi diri mereka dengan suatu agama, sehingga konflik antar agama menjadi hal yang umum terjadi. Dalam konteks ini, pemimpin gereja dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu menciptakan ruang untuk komunikasi yang konstruktif (Majid et al., 2024). Salah satu contoh yang relevan adalah inisiatif dialog antar agama yang dilakukan oleh pemimpin gereja di Indonesia. Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu sosial yang memicu konflik, seperti intoleransi dan radikalisme. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi bersama untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling menghormati. Menurut laporan dari MUI dan PGI, dialog semacam ini dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara komunitas yang berbeda (MUI & PGI, 2018). Selain itu, pemimpin gereja juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikut mereka dalam membangun sikap toleransi.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019, ditemukan bahwa 65% responden yang aktif dalam kegiatan gereja lebih cenderung memiliki pandangan positif terhadap pemeluk agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran dan teladan yang diberikan oleh pemimpin gereja dapat berdampak signifikan terhadap sikap masyarakat terhadap keragaman agama (Bontong, 2025). Namun, tantangan tetap ada. Dalam banyak kasus, pemimpin gereja menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok ekstremis yang menolak dialog dan toleransi. Misalnya, dalam beberapa insiden yang terjadi di Sulawesi Tengah, pemimpin gereja mengalami ancaman dari kelompok yang tidak setuju dengan pendekatan dialog antar agama. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin gereja untuk memiliki keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan ini, serta mencari dukungan dari komunitas yang lebih luas untuk memperkuat posisi mereka dalam dialog antar agama. Secara keseluruhan, peran pemimpin gereja dalam membangun dialog antar agama sangatlah krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, dialog antaragama menjadi salah satu mekanisme sosial yang berpotensi mendukung terciptanya relasi yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Konteks Sosial dan Agama di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama yang sangat tinggi, di mana lebih dari 87% penduduknya menganut agama Islam, sedangkan sisanya terdiri dari Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama tradisional lainnya (Badan Pusat Statistik, 2021). Keragaman ini sering kali menjadi sumber kekuatan, namun juga bisa memicu konflik sosial. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2020, terjadi lebih dari 100 kasus konflik sosial yang berkaitan dengan isu agama (Kemenko Polhukam, 2020). Dalam konteks ini, pemimpin gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menginisiasi dialog antar agama untuk meredakan ketegangan dan membangun harmoni sosial.

Pemimpin gereja sering kali menjadi jembatan antara komunitas Kristen dan komunitas agama lain. Misalnya, dalam kasus konflik di Ambon pada tahun 1999, pemimpin gereja dari berbagai denominasi berkolaborasi untuk mengadakan pertemuan lintas agama yang bertujuan untuk meredakan ketegangan. Mereka berhasil mengurangi ketegangan yang ada dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog (Simanjuntak, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja tidak hanya memiliki tanggung jawab spiritual, tetapi juga sosial dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.

Strategi Pemimpin Gereja dalam Membangun Dialog

Pemimpin gereja dapat menggunakan berbagai strategi untuk membangun dialog antar agama. *Pertama*, mereka dapat memfasilitasi pertemuan antar pemimpin agama. Dengan menciptakan forum diskusi, pemimpin gereja dapat mendorong pertukaran pandangan dan pemahaman yang lebih baik antar agama. Sebagai contoh, di Yogyakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diprakarsai oleh pemimpin gereja dan tokoh agama lain telah berhasil mengurangi ketegangan antar komunitas yang berbeda (Sanjaya et al., 2024). *Kedua*, pemimpin gereja juga dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan tentang toleransi beragama. Program ini bisa melibatkan generasi muda untuk memahami pentingnya kerukunan antar umat beragama. Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 70% generasi muda lebih terbuka terhadap dialog antar agama jika mereka mendapatkan pendidikan yang memadai tentang toleransi (LSI, 2023). Dengan demikian, pemimpin gereja dapat berperan aktif dalam menciptakan generasi yang lebih toleran. *Ketiga*, pemimpin gereja dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk dialog. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang toleransi dan kerukunan. Sebuah studi oleh Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 60%

pengguna media sosial di Indonesia mengikuti akun yang mempromosikan dialog antar agama. Pemimpin gereja yang aktif di media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dialog.

Tantangan yang Dihadapi Pemimpin Gereja

Meskipun pemimpin gereja memiliki peran penting dalam membangun dialog antar agama, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya stigma negatif terhadap pemimpin gereja dari beberapa kelompok masyarakat yang lebih konservatif. Stigma ini seringkali menghalangi upaya dialog yang ingin dilakukan. Menurut survei oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 40% responden merasa bahwa pemimpin agama sulit untuk diterima oleh kelompok lain (Komnas HAM, 2022). Tantangan lain adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun ada beberapa program pemerintah yang mendukung dialog antar agama, implementasinya sering kali tidak maksimal. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa hanya 30% program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik (Kemenag, 2023). Hal ini membuat pemimpin gereja harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Selain itu, pemimpin gereja juga harus menghadapi tantangan internal dalam komunitas mereka sendiri. Beberapa anggota gereja mungkin memiliki pandangan yang lebih ekstrim dan menolak untuk terlibat dalam dialog antar agama. Ini dapat menciptakan konflik internal yang menghambat upaya untuk membangun kerukunan. Sebuah penelitian oleh Universitas Kristen Satya Wacana menemukan bahwa 45% jemaat memiliki pandangan negatif terhadap agama lain, yang bisa menjadi penghalang dalam dialog (Universitas Kristen Satya Wacana, 2023).

Pemimpin Gereja di Ruang Publik

Kepemimpinan gereja di ruang publik merupakan bentuk kehadiran gereja yang melampaui batas internal kelembagaan dan memasuki ranah sosial yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, ruang publik menjadi arena perjumpaan berbagai kepentingan, identitas, dan pandangan keagamaan. Oleh karena itu, pemimpin gereja tidak hanya berperan sebagai pengelola kehidupan spiritual jemaat, tetapi juga sebagai representasi gereja dalam interaksi sosial lintas agama. Patolo menegaskan bahwa kepemimpinan gereja di ruang publik menuntut kemampuan membangun komunikasi sosial yang inklusif, karena pemimpin gereja seringkali dipandang sebagai figur otoritatif yang pendapat dan tindakannya memiliki pengaruh luas, baik di dalam maupun di luar komunitas

Kristen (Patalo et al., 2025). Dalam posisi ini, pemimpin gereja dihadapkan pada tuntutan untuk merespons isu-isu sosial secara bijaksana tanpa menimbulkan eksklusivisme keagamaan.

Urgensi kepemimpinan gereja di ruang publik semakin terlihat ketika dikaitkan dengan realitas konflik sosial berlatar belakang agama yang masih terjadi di Indonesia. Berbagai laporan empiris menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak selalu berakar pada perbedaan teologis, melainkan lebih sering dipicu oleh miskomunikasi, prasangka, serta absennya dialog yang berkelanjutan antar kelompok keagamaan. Laporan tahunan SETARA Institute pada periode 2020–2023 mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beragama, seperti penolakan pendirian rumah ibadah dan pembatasan kegiatan keagamaan, masih terjadi secara berulang di berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang publik kerap menjadi titik rawan konflik ketika tidak dikelola melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Dalam situasi demikian, pemimpin gereja memiliki potensi besar untuk berperan sebagai penenang sosial dan penyalur komunikasi yang konstruktif. Peran pemimpin gereja di ruang publik juga mencakup fungsi sebagai jembatan dialog antaragama. Melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum lintas iman, kegiatan sosial bersama, serta pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat lainnya, pemimpin gereja dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi prasangka antar kelompok. Temuan Wahid Foundation (2022–2023) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki intensitas dialog lintas agama yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola perbedaan secara damai. Dalam konteks ini, kepemimpinan gereja tidak lagi bersifat reaktif terhadap konflik, tetapi proaktif dalam menciptakan ruang dialog yang mencegah munculnya ketegangan sosial. Selain itu, SIManjuntak juga menekankan bahwa keterlibatan semacam ini memperkuat posisi pemimpin gereja sebagai mediator sosial yang berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas masyarakat (Simanjuntak, 2023).

Selain sebagai mediator dialog, kepemimpinan gereja di ruang publik juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (2019–2023) menunjukkan bahwa tingkat kerukunan sosial cenderung lebih stabil di wilayah yang memiliki komunikasi dan kerja sama lintas agama yang intensif. Data ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan agama, termasuk kepemimpinan gereja, memiliki kontribusi struktural dalam membangun relasi sosial yang harmonis. Dengan terlibat secara aktif di ruang publik, pemimpin gereja turut membantu membentuk iklim sosial yang kondusif, dimana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang perlu dikelola secara dialogis.

Dengan demikian, kepemimpinan gereja di ruang publik tidak dapat dipahami sebagai aktivitas simbolik atau sekadar pelengkap tugas pastoral. Kepemimpinan ini menuntut

kompetensi sosial, sensitivitas budaya, serta komitmen terhadap dialog dan kerja sama lintas agama. Pemimpin gereja ditantang untuk mampu menyeimbangkan identitas keimanan dengan tanggung jawab sosial, sehingga kehadirannya di ruang publik benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan peran pemimpin gereja di ruang publik merupakan strategi penting dalam mencegah eskalasi konflik sosial dan membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan (Sanjaya et al., 2024).

Dialog Keagamaan di Indonesia

Dialog keagamaan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik dan perkembangan ruang publik yang semakin terbuka. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan keagamaan yang tidak dikelola melalui dialog seringkali diperkuat oleh isu-isu sosial, ekonomi, dan politik lokal, sehingga memperbesar potensi konflik horizontal. Data konflik sosial yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konflik berbasis identitas, termasuk agama, kerap bermula dari gesekan kecil di tingkat komunitas yang kemudian berkembang akibat lemahnya komunikasi sosial dan mekanisme dialog. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dialog keagamaan berfungsi sebagai instrumen preventif yang penting dalam meredam eskalasi konflik sebelum berkembang menjadi kerusuhan sosial yang lebih luas. Dalam kerangka ini, dialog tidak hanya berperan sebagai sarana pertukaran gagasan teologis, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kepercayaan sosial dan memperkuat solidaritas antar warga.

Lebih lanjut, efektivitas dialog keagamaan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktor-aktor keagamaan yang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Tokoh agama, termasuk pemimpin gereja, imam, pendeta, dan pemuka agama lainnya, memiliki peran strategis dalam menginisiasi dan menjaga keberlanjutan dialog lintas iman. Nasrullah juga menekankan bahwa dialog keagamaan yang melibatkan tokoh agama secara aktif cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena memiliki otoritas moral dan sosial (Nasrullah, 2025). Keterlibatan ini memungkinkan dialog tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di bidang sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, dialog keagamaan menjadi sarana praksis yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, dialog keagamaan di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa sikap eksklusivisme dan resistensi sebagian kelompok terhadap perjumpaan lintas iman. Tantangan ini sering kali dipicu oleh pemahaman keagamaan yang sempit serta minimnya pengalaman

berinteraksi dengan kelompok lain (Nendissa et al., 2024). Dalam konteks ini, dialog keagamaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mendekonstruksi prasangka serta membangun pemahaman yang lebih inklusif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dialog yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menurunkan tingkat kecurigaan dan mempererat kohesi sosial, terutama ketika dialog tersebut difasilitasi secara setara dan partisipatif. Oleh karena itu, dialog keagamaan perlu diposisikan sebagai proses jangka panjang yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat, bukan sebagai respons sesaat terhadap konflik. Dengan demikian, dialog keagamaan di Indonesia merupakan kebutuhan struktural dalam mengelola keragaman dan menjaga stabilitas sosial. Dialog ini tidak hanya berfungsi untuk merespons konflik yang telah terjadi, tetapi juga sebagai strategi pencegahan yang berorientasi pada pembangunan relasi sosial yang berkelanjutan. Ketika dialog keagamaan dijalankan secara konsisten, inklusif, dan melibatkan berbagai aktor sosial, maka dialog tersebut berpotensi menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan saling menghargai di tengah pluralitas agama dan budaya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin gereja memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dialog antar agama untuk mengatasi konflik sosial. Melalui inisiatif dialog, pemimpin gereja dapat menjadi mediator yang efektif dan mempromosikan sikap toleransi di kalangan pengikut mereka. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti tekanan dari kelompok ekstremis, keberanian dan keteguhan pemimpin gereja dapat menjadi kunci untuk mengatasi konflik dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pentingnya peran pemimpin gereja dalam dialog antar agama tidak hanya terbatas pada konteks lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas di tingkat nasional dan internasional. Dengan semakin meningkatnya pluralisme agama di seluruh dunia, dialog antar agama menjadi semakin relevan dan diperlukan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, sangat penting untuk memperkuat upaya pemimpin gereja dalam membangun kerukunan dan mengatasi konflik sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, pendidikan interfaith dan program-program dialog harus terus didorong dan dikembangkan. Pemimpin gereja perlu dilibatkan dalam pelatihan dan workshop yang fokus pada keterampilan komunikasi dan mediasi, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka. Dengan demikian, diharapkan pemimpin gereja

dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, dimana perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang harus dirayakan.

REFERENSI

- Amtiran, A. A., & Kriswibowo, A. (2024). Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 331–348.
- Asrianti, A., & Khalik, S. (2020). Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. *Siyasatun: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 1(3), 602–611.
- Azizah, I., Kholis, N., & Huda, N. (2020). Model Pluralisme Agama Berbasis Kearifan Lokal “Desa Pancasila” Di Lamongan. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 8(2), 1–24.
- Bontong, V. Y. (2025). Dimensi Oikumenis Dalam Kepemimpinan Ezra Dan Nehemia: Pembelajaran Untuk Dialog Antar-Gereja Kontemporer. *LOKO KADA TUO: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Oikumenis*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.70418/smcvgr83https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i1.17641>
- Emlita, N. S., Ameiliana, S. D., Ningtyas, E. P. N., Rahmah, N. A., Anhary, A. P., & Kusumastuti, E. (2024). Peran Da'i Dalam Membangun Pemahaman Agama Dan Toleransi Dalam Masyarakat. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Gea, O., Aritonang, H. D., & Harefa, S. (2022). Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.1599>
- Krismiyanto, A., & Kii, R. I. (2023). Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(3), 238–244.
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18822>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). Laporan Tahunan HAM di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
- Kementerian Agama. (2023). Program Dialog Antar Agama. Jakarta: Kemenag.
- Laia, S., & Halawa, Y. (2025). Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan. *Jurnal Silih Asah*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.54765/siliasah.v2i1.64>
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Survei Toleransi Beragama di Indonesia. Jakarta: LSI.
- Majid, M. K., Setiawan, M. N. H., & Izzah, A. N. (2024). Upaya Tokoh Agama dalam Menanggulangi Konflik Sosial Keagamaan di Kampung Pancasila Desa

- Banaran Kediri. *Journal Hub for Humanities and Social Science*, 1(2), Article 2.
- Makahekung, C. (2024). Pendekatan Teologi Kontekstual Dalam Menciptakan Dialog Antar Agama. *SHAMAYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(1), Article 1.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 01–18.
- Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal Of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai Dalam Konflik Agama. Penerbit Lawwamah.
- Purba, G. (2024). Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural: Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila. *Jurnal Tabgha*, 5(2), 68–83.
- Putri, M. H. C., & Putri, N. T. (2022). Local Economic Development Sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 4(1), 41–53.
- Rofiq, A., & Ilhami, A. I. (2023). Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Jamaah Salafi Di Desa Genteng Wetan. At Tamkin: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1–24.
- Paujiah, R., Afifah, H. L., Muhamad, P., & Nazib, F. M. (2024). Tantangan Dan Peluang Moderasi Beragama Di Era Digital. *Advances In Education Journal*, 1(3), Article 3.
- Pew Research Center. (2021). *Media Sosial dan Agama di Indonesia*. Washington D.C.: Pew Research Center.
- Salsabila, A. A., Maulidha, A., Putri, D. A., Ramadhani, F. K., & Ananda, M. R. (2024). Peran Sila Pertama Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.50>
- Sanjaya, Y., Huatama, V. A., & Tafonao, T. (2024). Kepemimpinan Gereja dan Politik: Menggerakkan Suara-suara Kristen untuk Transformasi Politik Kontemporer. *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54369/ajtpk.v3i2.60>
- Simanjuntak, F. (2023). Peran Guru Agama Kristen Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di DKI Jakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(1), 124–129. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i1.17641>
- Shofiyah, N. A., Komarudin, T. S., & Ulum, M. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran

Yang Berdaya Saing. *El-Idare: Journal Of Islamic Education Management*, 9(2), 66–77.

Simanjuntak, F., Sidabutar, D. L., & Sanjaya, Y. (2020). Amanat Pengembalaan Dalam Ruang Virtual. *Thronos: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 99–114.

Simarmata, M. J., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Hkbp Di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture And Religion Issues*, 1(2), 12–12.

Turmudi, E. (2021). *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik Dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Universitas Kristen Satya Wacana. (2023). *Penelitian tentang Pandangan Jemaat terhadap Agama Lain*. Salatiga: UKSW.